

***COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN
EKSTREM DI KABUPATEN BOJONEGORO***

***COLLABORATIVE GOVERNANCE IN REDUCING EXTREME POVERTY IN
BOJONEGORO REGENCY***

Barotut Taqiyah¹, Rupiarsieh², Ana Kumalasari³

^{1,2,3} Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Bojonegoro

email korespondensi: anakumala30@gmail.com

Abstrak

Kabupaten Bojonegoro salah satu wilayah prioritas percepatan pembangunan ekonomi di Jawa Timur yang memiliki beragam potensi salah satunya pusat industri dan pertambangan (Perpres 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Jawa Timur). angka kemiskinan di Bojonegoro menjadi 22.430 atau 1,78 persen, hal ini membuat Bojonegoro mengalami penurunan kemiskinan berdasarkan angka absolute. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana proses kolaborasi yang dibangun dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bojonegoro. Metodologi penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan 6 sebagai subjek penelitian. Data yang diperoleh dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bojonegoro belum berjalan dengan optimal dan belum sepenuhnya efektif. Hal ini karena masih ada beberapa indikator yang belum terpenuhi sehingga menghambat keberhasilan kolaborasi, yaitu kondisi awal yang belum jelas, belum adanya kejelasan mengenai tugas fungsi yang harus dilakukan, stakeholder yang terlibat selalu melakukan tugasnya secara mandiri atau masing-masing instansi, terdapat komunikasi yang kurang efektif sehingga berpengaruh pada akses otoritas, sumber daya yang belum memadai.

Kata kunci: *collaborative governance*, stakeholder, pengentasan kemiskinan ekstrem.

Abstract

Bojonegoro Regency is one of the priority areas for accelerating economic development in East Java which has a variety of potential, one of which is an industrial and mining center (Presidential Decree 80 of 2019 concerning the Acceleration of Economic Development in East Java). The poverty rate in Bojonegoro became 22,430 or 1.78 percent, this made Bojonegoro experience a decrease in poverty based on absolute figures. This research aims to describe how the collaboration process was built to eradicate extreme poverty in Bojonegoro Regency. The research methodology uses a qualitative descriptive research method with 6 as research subjects. Data obtained using interview, observation and documentation techniques. The research results show that collaborative governance in alleviating extreme poverty in Bojonegoro Regency has not run optimally and is not fully effective. This is because there are still several indicators that have not been met, thus hampering the success of collaboration, namely initial conditions that are not yet clear, there is no clarity regarding the functional tasks that must be carried out, the stakeholders involved always carry out their duties independently or at each agency, there is a lack of communication. effective so that it affects access to authority, inadequate resources.

Keywords: *collaborative governance, stakeholder, extreme poverty reducing.*

1. Pendahuluan

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. Dengan pertimbangan bahwa kemiskinan masih menjadi problem di berbagai negara di dunia ini, maka “penghilangan kemiskinan dan kelaparan” pada 2030 menjadi “tulang punggung” dari tujuan agenda pembangunan berkelanjutan. Kemiskinan yang menjadi tujuan utama Millennium Development Goals (MDGs) kembali menjadi tujuan utama dalam Sustainable Development Goals (SDGs).

Millennium Development Goals (MDGs) adalah sebuah paket berisi tujuan yang mempunyai batas waktu dan target terukur untuk menanggulangi kemiskinan, kelaparan, pendidikan, diskriminasi perempuan, kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit, dan perbaikan kualitas lingkungan telah dilakukan oleh

negara-negara sejak 2001 hingga akhir 2015. MDGs bertujuan mengurangi kemiskinan, tetapi gagal memperhatikan dan mengatasi akar masalah kemiskinan. MDGs tidak secara khusus memperhatikan pentingnya mencapai tujuan perbaikan pembangunan ekonomi. MDGs kurang memperhatikan sifat holistik, inklusif, dan keberlanjutan pembangunan. Indonesia telah berhasil mencapai sebagian besar target MDGs Indonesia yaitu 49 dari 67 indikator MDGs, namun demikian masih terdapat beberapa indikator yang harus dilanjutkan dalam pelaksanaan TPB/SDGs.

GAMBAR 1.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



Sumber : GTP, 2016

Berdasarkan gambar diatas SDGs terdiri atas 17 tujuan dan 169 target, yang meliputi aneka isu pembangunan berkelanjutan.

Kemiskinan (*Poverty*) merupakan isu penting dalam tujuan SDGs yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di setiap tempat. Dalam inisiatif global ini, Indonesia juga

merupakan negara yang ikut serta dalam menyukseskan SDGs terutama upaya dalam pengentasann kemiskinan ekstrem. Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.

Kemiskinan dalam konteks pengentasan kemiskinan ekstrem dimaknai sebagai ketidakmampuan atau keterbatasan kemampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidup pada batas minimum kesejahteraan ekonomi. Manifestasi keterbatasan atau kurang mampuan adalah :

- (1) keterbatasan/ketidakmampuan memenuhi asupan kalori dan protein untuk bertahan hidup
- (2) keterbatasan/ketidakmampuan pemenuhan kebutuhan sandang untuk hidup layak
- (3) keterbatasan/ketidakmampuan memenuhi kebutuhan biaya kesehatan
- (4) keterbatasan/ketidakmampuan dalam memenuhi biaya hidup
- (5) keterbatasan/ketidakmampuan memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang memiliki sarana minimal penunjang kesehatan.

Di dalam RPJPN 2005-2025, masalah kemiskinan dilihat dalam kerangka multidimensi, karenanya kemiskinan bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan, melainkan karena menyangkut beberapa hal

antara lain: (i) kerentanan dan kerawanan orang atau masyarakat untuk menjadi miskin; (ii) menyangkut ada/tidak adanya pemenuhan hak dasar warga dan ada/tidak adanya perbedaan perlakuan seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Penanggulangan kemiskinan daerah berarti mengalokasikan anggaran publik untuk mengurangi proporsi penduduk yang berada pada kondisi rentan di bawah garis kemiskinan atau kondisi hidup layak. Hal ini menyangkut politik anggaran, artinya penggunaan kekuasaan untuk menentukan "siapa menerima berapa" dan "melalui mekanisme yang seperti apa". Oleh karena itu pendekatan identifikasi penilaian program *pro poor* didasarkan pada perspektif kemiskinan dari sudut pandang sosial politik (Lehning, 2007).

Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem telah memberikan hak kepada daerah dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan melibatkan peran serta masyarakat yang difokuskan pada lokasi

prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Khususnya memberikan instruksi kepada bupati/walikota terkait melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah kabupaten/kota, menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan yang dibuktikan dengan berita musyawarah desa/kelurahan, Menyusun program dan kegiatan pada rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota serta mengalokasikan anggaran pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (*by name by address*), memfasilitasi penyediaan lahan perumahan bagi penerima manfaat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Kabupaten Bojonegoro salah satu wilayah prioritas percepatan pembangunan ekonomi di Jawa Timur yang memiliki beragam potensi salah satunya pusat industri dan pertambangan (Perpres 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Jawa Timur). Potensi yang ada perlu dioptimalkan dan diselaraskan dengan melalui perencanaan pembangunan yang dijabarkan dalam program dan kegiatan yang

diharapkan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat, dan tetap mempertimbangkan keberlanjutan. Penduduk di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2022 sebanyak 1.343.164 jiwa meningkat 0,14% dari tahun sebelumnya yaitu 1.341.259 jiwa.

Dalam observasi awal peneliti yang bersumber dari Satu Data Bojonegoro terkait APBD Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2022 sebesar Rp 5,9 triliun, kemudian adanya tambahan sekitar Rp 1,7 triliun sehingga mengalami Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (P-APBD) Kabupaten Bojonegoro tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp 7,3 triliun. Jumlah tersebut menempati APBD tertinggi kedua di Jawa Timur. Namun, beberapa program pemerintah masih menggunakan dana CSR perusahaan yang beroperasi di Bojonegoro untuk menutupi program yang tidak tercover oleh APBD.

Berdasarkan hasil temuan peneliti, kolaborasi formal memang tertuang dalam SK tersebut akan tetapi adanya pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bojonegoro berdasarkan SK Bupati Bojonegoro nomor : 188/106/KEP/412.013/2021 yang mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan agar dapat

diamati secara terukur, akan tetapi beberapa stakeholder yang tidak ikut andil secara partisipatif dalam kolaborasi tersebut.

Oleh karena itu, berdasarkan kontekstualisasi permasalahan penelitian dengan analisis kajian keilmuan, maka penting adanya untuk dapat dilakukan penelitian yang lebih mendalam terkait kajian collaborative governance dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupten Bojonegoro. Dengan menggunakan pendekatan collaborative governance dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memberikan rekomendasi memecahkan permasalahan yang dihadapi setiap stakeholders dan mempercepat capaian hasil dari pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupten Bojonegoro.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus terjalin. Seperti dikatakan oleh Sugiyono (2009:15) bahwa penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis

tertentu, tetapi didasarkan pada filosofi post-positivis yang digunakan oleh peneliti untuk mempelajari keadaan objek-objek alam utama (bukan eksperimen).

Informan dalam penelitian ini dipilih dengan cara *purposive sampling*, yaitu penentuan informan yang dipilih dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tertentu, yakni mengkhususkan subjek-subjek penelitian sedang atau telah mengalami fenomena yang sedang diteliti, dimana penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengeneralisasi (Sugiyono, 2008, H.85).

Sumber data yang dipakai adalah sumber data primer dan data sekunder dengan cara observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis data interaktif Model Miles and Huberman, yang terdiri dari *data reduction, data display and conclusion drawing/verifying*".

3. Hasil Dan Pembahasan

a. Kondisi awal

1. Faktor Lingkungan

Berdasarkan indikator kondisi awal, proses kolaborasi dalam pengentasan kemiskinan ekstrem sudah memenuhi indikator tersebut dalam konteks faktor lingkungan. Hal ini dibuktikan bahwa bentuk kolaborasi yang dibangun dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bojonegoro adanaya Surat Keputusan Bupati Nomor : 188/106/KEP/412.013/2021

tentang Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro,

Dengan demikian struktur TKPK Kabupaten Bojonegoro sebetulnya sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 53 Tahun 2020, Namun masih ada satu unsur yang belum terdapat dalam Struktur TKPK tersebut yaitu dari unsur media massa.

Dengan demikian, dari hasil penelitian dan temuan dilapangan jika dikaitkan dengan teori menurut Bryson, Crosby, dan Stone (2006) dapat disimpulkan bahwa sinergitas yang dibangun pemerintah dalam kolaborasi pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bojonegoro dalam faktor lingkungan ini belum berjalan. Jika dikaitkan dengan pendekatan model *hexahelix*, kolaborasi tersebut belum bisa dikatakan maksimal, karena belum melibatkan semua pemangku kepentingan seperti media massa.

2. Kegagalan

Dalam kegagalan didapatkan bahwa adanya faktor kegagalan pengentasan kemiskinan ekstrem sendiri yaitu fungsi dari TKPK tidak dijalankan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati tersebut. Jika dilihat dalam konteks kolaborasi yang berjalan dengan adanya SK Bupati tersebut, kurang optimalnya keberadaan dari tim tersebut sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Dengan demikian, dari hasil penelitian dan temuan dilapangan jika

dikaitkan dengan teori menurut Bryson, Crosby, dan Stone (2006) dapat disimpulkan berdasarkan hal diatas. dapat disimpulkan bahwasannya kolaborasi yang dibentuk dalam pengentasan kemiskinan ekstrem sebatas hubungan koordinasi, akan tetapi fungsi dari tim itu tidak melakukan pemberdayaan dari setiap anggota yang terlibat.

3. Mekanisme penghubung Organisasi

Berdasarkan sub indikator adanya mekanisme penghubung organisasi sesuai dengan adanya DAMISDA sebagai bentuk awal dari penghubung dalam TKPK.

Dengan demikian, dari hasil penelitian dan temuan dilapangan jika dikaitkan dengan teori menurut Bryson, Crosby, dan Stone (2006) dapat disimpulkan berdasarkan hal diatas. dapat disimpulkan bahwasannya adanya penghubung kolaborasi sudah berjalan dengan baik.

b. Komponen Proses

1. Membuat Kesepakatan awal

Dalam sub Indikator ini didapatkan bahwa seluruh stakeholder membuat kesepakatan yang lebih baik dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bojonegoro yaitu adanya penepatan data sasaran yang dilakukan akan tetapi keterlibatan setiap stakeholder tidak sesuai dengan fungsinya.

Dengan demikian Dengan demikian, dari hasil penelitian dan temuan dilapangan

jika dikaitkan dengan teori menurut Bryson, Crosby, dan Stone (2006) disimpulkan bahwa dari kesepakatan awal yang dibuat ternyata tidak ada kesepahaman antar stakeholder terkait kolaborasi yang dilakukan

2. Membangun kepemimpinan

Dalam sub Indikator ini didapatkan bahwa terlihat jelas bagaimana kepemimpinan ini dibentuk, namun pastinya setiap stakeholder yang terlibat mempunyai pemimpin masing-masing sehingga pemimpin formal ini dapat membantu dalam koordinasi dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di kabupaten Bojonegoro.

Namun jika dikaitkan dengan teori menurut Bryson, Crosby, dan Stone (2006) disimpulkan bahwa kepemimpinan yang ada dalam TKPK Masih kurang maksimal karena ketua tim tidak pernah melakukan koordinasi secara langsung dalam setiap adanya Rapat Koordinasi. Dengan demikian kepemimpinan ini langsung ditujuk oleh bupati dalam menjalankan berjalannya TKPK.

3. Membangun Legitimasi

Berdasarkan legitimasi yang dilakukan dalam TKPK yang dilakukan melalui adanya berita acara serah terima yang dilakukan BAPPEDA kepada BPS. Dalam hal ini legitimasi yang dilakukan cukup maksimal.

Dengan demikian, dari hasil penelitian dan temuan dilapangan jika dikaitkan dengan teori menurut Bryson, Crosby, dan Stone

(2006) disimpulkan bahwa legitimasi yang dibentuk sudah terjalin melalui surat serah terima yang dilakukan oleh kolabolator.

4. Membangun Kepercayaan

Berdasarkan dari Sub Indikator adanya saling percaya diantara pelaku, proses kolaborasi dalam pengentasan kemiskinan ekstrem bahwa kepercayaan antar pihak-pihak yang terlibat cukup baik. Namun terdapat pihak yang tidak dilibatkan seperti Media Massa masihragu dan tidak percaya terhadap informasi maupun usaha yang dilakukan oleh pemerintah.

Dengan demikian, dari hasil penelitian dan temuan dilapangan jika dikaitkan dengan teori menurut Bryson, Crosby, dan Stone (2006) kurang percaya, Hal ini didasari akibat kurangnya komunikasi dan masih tingginya ego sektoral dari masing-masing pihak, sehingga perlu dibangun rasa percaya dan komunikasi saat kolaborasi dilakukan.

5. Mengelola Konflik

Berdasarkan dari subindikator konflik yang terjadi memang perlu selesaikan, akan tetapi secara advokasi konflik dapat diselesaikan dengan baik. Dengan demikian, dari hasil penelitian dan temuan dilapangan jika dikaitkan dengan teori menurut Bryson, Crosby, dan Stone (2006) pengelolaan konflik kurang baik, Hal ini didasari sebagai bentuk penyelesaian konflik dalam kolaborasi itu sendiri. Namun dalam faktanya adanya konflik dalam TKPK yang belum

diselesaikan, sehingga perlu adanya advokasi ke semua anggota TKPK agar kolaborasi yang dilakukan terjadi secara maksimal.

6. Perencanaan

Dalam pengentasan kemiskinan ekstrem sudah adanya perencanaan dari pemerintah sendiri akan, namun dalam perencanaan tugas dari TKPK itu sendiri kurang maksimal dalam menjalankan rencana aksinya dalam membantu pengentasan kemiskinan ekstrem.

Dengan demikian, dari hasil penelitian dan temuan dilapangan jika dikaitkan dengan teori menurut Bryson, Crosby, dan Stone (2006) sudah terbentuk akan tetapi kurang terkonsep oleh kolaborator Hal ini terjadi karena temuan dilapangan karena semua program dalam pengentasan kemiskin ekstrem dirancang oleh OPD saja, padahal harusnya NGO, Akademi, Media Massa terlibat dalam proses perencanaan sampai dengan laporan.

c. Struktur dan Tata Kelola

1. Konteks Struktur

Demikian dalam konsep kolaborasi *hexahelix* masih kurang maksimal. Namun dalam konsep *hexahelix* belum bisa dikatakan baik, karena keterlibatan dari beberapa *stakeholder* tidak adanya konteks struktural yang jelas. Hal ini didasari adanya *stakeholder* yang tidak tau bagaimana tugas dan fungsi dari masing-masing pihak yang terlibat.

2. Konfigurasi Struktur

Dalam konfigurasi struktur terlihat dari rapat koordinasi yang dilakukan. Efektivitas dari kolaborasi yang dilakukan sangat kurang. Hal ini didasari oleh komunikasi yang dilakukan oleh para pihak terkait kejelasan dalam TKPK dibentuk.

Dengan demikian, dari hasil penelitian dan temuan dilapangan jika dikaitkan dengan teori menurut Bryson, Crosby, dan Stone (2006) sudah terkonfigurasi, namun dalam hal yang dilakukan oleh OPD terkait sudah cukup jelas, karena komunikasi yang cukup bagus terjadi dalam OPD saja.

3. Tata Kelola

Dalam kolaborasi pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bojonegoro yang menjadi anggota maupun bukan anggota belum baik dalam segi kolaborasi prosesnya, Namun baiknya yang tertuang dalam SK bupati adanya fungsi dan tugas yang harusnya dijalankan sesuai dengan wewenang masing-masing. Dalam keanggotannya belum tergambar jelas dan kegiatannya harusnya tidak dilakukan dari awal, proses sampai dengan hasil. Harusnya kejelasan TKPK secara fungsi harus dijalankan sehingga kolaborasi yang dilakukan dapat dilakukan dengan baik dan terarah.

d. Kontingensi dan Kendala

1. Jenis Kolaborasi

Dalam subindikator ini jenis kolaborasi yang dilakukan oleh TKPK sesuai Surat keputusan bupati dengan konsep *pentahelix*. Namun dalam kolaborasi yang terjadi dilapangan tidak bisa dikatakan kolaborasi karena fungsi dari TKPK sendiri kurang baik.

2. Ketidakseimbangan pengaruh/kekuasaan

Dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bojonegoro ketidakseimbangan pengaruh sangat berpengaruh dan kurang baik, hal ini didasari karena profesionalisme antara penasihat dan ketua kurang begitu baik.

3. Persaingan Logika Kelembagaan

Dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bojonegoro persaingan logika kelembagaan dapat dikatakan tidak terlalu berpengaruh, hal ini didasari karena setiap *stakeholder* mempunyai program yang sinkron.

e. Hasil dan Akuntabilitas

1. Nilai Publik

Dalam nilai publik harusnya dapat dilihat oleh masyarakat, perlu adanya *opensource* yang harus dilakukan oleh TKPK bersama BAPPEDA. Oleh karena itu data yang diberikan perlu jelas dalam kevalidannya.

2. Efek Pertama, kedua, Ketiga

Hal ini dilihat dari kondisi awal dari kolaborasi dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bojonegoro, efek

pertama ini dilihat dari *stakeholder* yang dilibatkan dalam konsep *hexahelix*. kedua dalam proses kolaborasi yang dilakukan harusnya TKPK sesuai dengan tugas dan fungsi yang terlampir dalam SK Bupati, namun ternyata fungsi ini belum dilaksanakan dengan baik. Ketiga perlu adanya evaluasi yang dilakukan dalam TKPK ini karena konflik yang terjadi harus dapat diselesaikan dengan baik.

Dengan demikian, dari hasil penelitian dan temuan dilapangan jika dikaitkan dengan teori menurut Bryson, Crosby, dan Stone (2006) belum cukup terlihat hasil dari efek pertama, kedua dan ketiga.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas dari TKPK ini adanya penetapan terkait DAMISDA melalui Rapat Koordinasi yang dilakukan. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pihak BAPPEDA bahwa mereka selalu melalkukam musyawaran bersama sesama OPD dengan kaitannya isu pengentasan kemiskinan ekstrem, namun belum melibatkan *stakeholder* lain seperti akademisi, media massa,dunia usaha, NGO dan masyarakat. Padahal pihak-pihak terkait jika dilibatkan maka mereka akan membantu dari awal, proses sampai adanya laporan.

f. Konsep Helix

Hal ini dilihat dari kondisi awal dari kolaborasi dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bojonegoro,

berdasarkan konsep *pentahelix* sudah terjalin akan tetapi prosesnya konsep ini belum berjalan dengan baik dan maksimal.



Keharusan stakeholder dalam melakukan berbagai koordinasi yang kompleks memang seringkali menimbulkan berbagai polemic dan tidak mudah dilakukan. Mengingat para stakeholder memiliki posisi dan kepentingan yang beragam (Kumalasari et al., 2019).

5. Kesimpulan

Penelitian mengenai Collaborative Governance dalam pencegahan tindak kekerasan pada anak di Kabupaten Bojonegara menggunakan teori kolaborasi dari Bryson, Crosby, dan Stone untuk mendeskripsikan proses collaborative governance dalam pencegahan tindak kekerasan pada anak di Kabupaten Bojonegara. Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil dari Kondisi awal :

a. Faktor Lingkungan dapat disimpulkan bahwa sinergitas yang dibangun pemerintah dalam kolaborasi pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bojonegara dalam faktor lingkungan ini belum berjalan. Jika dikaitkan dengan pendekatan model hexahelix, kolaborasi tersebut belum bisa dikatakan maksimal, karena belum melibatkan semua pemangku kepentingan seperti media massa.

b. Kegagalan disimpulkan berdasarkan hal diatas. dapat disimpulkan bahwasannya kolaborasi yang dibentuk dalam pengentasan kemiskinan ekstrem sebatas hubungan koordinasi, akan tetapi fungsi dari tim itu tidak melakukan pemberdayaan dari setiap anggota yang terlibat.

c. Mekanisme penghubung Organisasi disimpulkan berdasarkan hal diatas. dapat disimpulkan bahwasannya adanya penghubung kolaborasi sudah berjalan dengan baik.

2. Berdasarkan hasil Komponen Proses :

a. Membuat Kesepakatan awal disimpulkan bahwa dari kesepakatan awal yang dibuat ternyata tidak ada kesepahaman antar stakeholder terkait kolaborasi yang dilakukan

b. Membangun kepemimpinan disimpulkan bahwa kepemimpinan yang ada dalam TKPK Masih kurang maksimal karena ketua tim tidak pernah melakukan koordinasi secara langsung dalam setiap

- adanya Rapat Koordinasi. Dengan demikian kepemimpinan ini langsung ditunjuk oleh bupati dalam menjalankan berjalannya TKPK.
- c. Membangun Legitimasi disimpulkan bahwa legitimasi yang dibentuk sudah terjalin melalui surat serah terima yang dilakukan oleh kolabolator.
 - d. Membangun Kepercayaan dapat disimpulkan bahwa kurang kepercayaan Hal ini didasari akibat kurangnya komunikasi dan masih tingginya ego sektoral dari masing-masing pihak, sehingga perlu dibangun rasa percaya dan komunikasi saat kolaborasi dilakukan.
 - e. Mengelola Konflik dapat disimpulkan bahwa pengelolaan konflik kurang baik, Hal ini didasari sebagai bentuk penyelesaian konflik dalam kolaborasi itu sendiri. Namun dalam faktanya adanya konflik dalam TKPK yang belum diselesaikan, sehingga perlu adanya advokasi ke semua anggota TKPK agar kolaborasi yang dilakukan terjadi secara maksimal.
 - f. Perencanaan dapat disimpulkan bahwa sudah terbentuk akan tetapi kurang terkonsep oleh kolaborator Hal ini terjadi karena temuan dilapangan karena semua program dalam pengentasan kemiskin ekstrem dirancang oleh OPD saja, padahal harusnya NGO, Akademi, Media Massa terlibat dalam proses perencanaan sampai dengan laporan.
3. Berdasarkan hasil dari Struktur dan Tata Kelola :
- a. Konteks Struktur dapat disimpulkan bahwa dalam konsep kolaborasi hexahelix masih kurang maksimal. Namun dalam konsep hexahelix belum bisa dikatakan baik, karena keterlibatan dari beberapa stakeholder tidak adanya konteks struktural yang jelas. Hal ini didasari adanya stakeholder yang tidak tau bagaimana tugas dan fungsi dari masing-masing pihak yang terlibat.
 - b. Konfigurasi Struktur dapat disimpulkan bahwa) sudah terkonfigurasi, namun dalam hal yang dilakukan oleh OPD terkait sudah cukup jelas, karena komunikasi yang cukup bagus terjadi dalam OPD saja.
 - c. Tata Kelola dapat disimpulkan bahwa dalam kolaborasi pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bojonegoro yang menjadi anggota maupun bukan anggota belum baik dalam segi kolaborasi prosesnya, Namun baiknya yang tertuang dalam SK bupati adanya fungsi dan tugas yang harusnya dijalankan sesuai dengan wewenang masing-masing. Dalam keanggotannya belum tergambar jelas dan kegiatannya harusnya tidak dilakukan dari awal, proses sampai dengan hasil. Harusnya kejelasan TKPK secara fungsi

harus dijalankan sehingga kolaborasi yang dilakukan dapat dilakukan dengan baik dan terarah.

4. Berdasarkan hasil dari Kontingensi dan

Kendala :

- a. Jenis Kolaborasi dapat disimpulkan bahwa dalam subindikator ini jenis kolaborasi yang dilakukan oleh TKPK sesuai Surat keputusan bupati dengan konsep pentahelix. Namun dalam kolaborasi yang terjadi dilapangan tidak bisa dikatakan kolaborasi karena fungsi dari TKPK sendiri kurang baik.
- b. Ketidakseimbangan pengaruh/kekuasaan dapat disimpulkan bahwa Dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bojonegoro ketidakseimbangan pengaruh sangat berpengaruh dan kurang baik, hal ini didasari karena profesionalisme antara penasihat dan ketua kurang begitu baik.
- c. Persaingan Logika Kelembagaa dapat disimpulkan bahwa dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bojonegoro persaingan logika kelembagaan dapat dikatakan tidak terlalu berpengaruh, hal ini didasari karena setiap stakeholder mempunyai program yang sinkron.

5. Berdasarkan Hasil dan Akuntabilitas :

- a. Hasil Nilai Publik dapat disimpulkan bahwa dalam nilai publik harusnya dapat dilihat oleh masyarakat, perlu adanya

opensource yang harus dilakukan oleh TKPK bersama BAPPEDA. Oleh karena itu data yang diberikan perlu jelas dalam kevalidannya.

- b. Efek Pertama, kedua, Ketiga dapat disimpulkan bahwa belum cukup terlihat hasil dari efek pertama, kedua dan ketiga.
2. Akuntabilitas dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas dari TKPK ini adanya penetapan terkait DAMISDA melalui Rapat Koordinasi yang dilakukan. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pihak BAPPEDA bahwa mereka selalu melalkukam musyawaran bersama sesama OPD dengan kaitannya isu pengentasan kemiskinan ekstrem, namun belum melibatkan stakeholder lain seperti akademisi, media massa,dunia usaha, NGO dan masyarakat. Padahal pihak-pihak terkait jika dilibatkan maka mereka akan membantu dari awal, proses sampai adanya laporan.

6. Daftar Pustaka

- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta
- Retno Sunu Astuti, Hardi Warsono, Abd. Rachim. 2020. "Sampul Collaborative Governance." 161.Universitas Diponegoro
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
<https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>

- Astuti, R.S., Warsono, H., Rachim, A. (2020). Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik. 32-97,
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2006). The Design and Implementation of Cross-Sector Collaborations: Propositions from the Literature. *Public Administration Review*, 66(1), 44–55. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00665.x>
- Kumalasari, A., Suharto, D., & Haryanti, R. (2019). *Elitism in Policy Planning on Village Government*.
- Santoso, E.B., Sutikno., Siswanto, V.K., Setyaningsih, Y. (2022). Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Tuban Melalui Integrasi Program Antar OPD. *Sewagati*, 7(1):113–129, <https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i1.447>.
- Waardenburg, Maurits, Martijn Groenleer, Jorrit de Jong, and Bas Keijser. 2020. “Paradoxes of Collaborative Governance: Investigating the Real-Life Dynamics of Multi-Agency Collaborations Using a Quasi-Experimental Action-Research Approach.” *Public Management Review* 22(3): 386–407.
- Dokumen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro
- Dokumen ID Fos Bojonegoro
- Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, (2022)
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019
- Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilir dan Lintas Selatan (2019).
- Permendagri Nomor 53 tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota
- Surat Keputusan Bupati Nomor 188/106/KEP/412.013/2021 terkait Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 – 2023